

STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI SEKTOR HOME INDUSTRY

Aleksius Beatus Ringgi Soka, Totok Sasongko, Dody Setyawan

Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: aleksius12@yahoo.com

Abstrak: *Home industry* telah diakui sangat strategis dan penting terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan harus memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan usaha tersebut dengan membuat sebuah strategi, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Memberikan bantuan untuk kemudahan dalam akses permodalan, 2) Bantuan Pembangunan Prasarana penunjang yang membantu *home industry* dalam menjalankan usahanya, 3) Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha. 4) Pengembangan sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan *home industry* untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik. 4) Peningkatan Akses Teknologi bagi pengembangan *home industry*. 5) Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif, sangat menentukan perkembangan *home industry*, karena persoalan yang selama ini terjadi seperti masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis merupakan bukti adanya iklim yang kurang kondusif.

Kata kunci: *Strategi, Pemerintahan Desa, Peningkatan Pendapatan, Home Industry*

Summary: *Home industry* has been recognized as very strategic and important to increase people's income. So, the government should give special attention to developments in the effort by creating a strategy, including fostering environments conducive business environment, facilitate and provide access to productive resources and strengthen entrepreneurship and competitiveness. This research uses descriptive qualitative method. The research results showed 1) Provide assistance to the ease of access to capital. 2) Supporting Infrastructure Development Assistance to help home industry in business, 3) Development of Business Networking, Marketing and Business Partnership. 4) Development of human resources to support the success of home industry to penetrate global markets or face the imported products in the domestic market. 5) Improving Technology Access for the development of home industry. 6) Creating a more conducive business climate, development of home industry is crucial, because the issue that has been happening as the low service delivery, lack of rule of law and local regulations do not constitute evidence of a pro-business climate unfavorable.

Keywords: *Strategy, Governance Village, Increased Revenue, Home Industry*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini sering muncul wacana ekonomi kerakyatan, hal ini dipicu oleh masalah buruknya tingkat perekonomian di Indonesia yang belum juga teratasi. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terkesan belum begitu ampuh hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Banyak kalangan yang menilai bahwa ini adalah kegagalan pemerintah, sebagai sebuah wadah yang menampung aspirasi masyarakat, dan juga sebagai pembuat kebijakan, sehingga pemerintah dianggap pantas dipersalahkan karena masalah ini.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam persoalan memperkuat ekonomi negara,

masyarakat juga diminta untuk lebih proaktif, dalam usaha peningkatan APBN maupun APBD. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, berbagai elemen-elemen penting dituntut untuk ikut berperan aktif karena dapat diasumsikan bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan, jika masyarakat sebagai sasaran utamanya tidak dilibatkan maka kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia.

Langka selanjutnya yang harus dilakukan dalam usaha merealisasikan setiap tujuan yang diterapi adalah, berusaha meramu sebuah strategi yang sekiranya bersentuhan dengan tujuan kebijakan. Strategi pemerintahan merupakan bentuk implementasi dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan jaminan bahwa upaya pencapaian tujuan dapat terwujud.

Salah satu bentuk strategi pemerintahan yaitu upaya peningkatan pendapatan masyarakat, dalam hal ini mengenai sektor usaha kecil. Pembangunan industri di Indonesia diarahkan untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar, khususnya dalam memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu jalan untuk memperlancar proses pembangunan disebuah negara adalah dengan cara menempuh strategi industrialisasi. Banyak yang berpendapat bahwa industrialisasi merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa yang ingin maju. Bahkan maju mundurnya suatu bangsa biasanya diukur dengan keberhasilannya dalam melaksanakan proses industrialisasi. Disini peran strategi pemerintah secara tepat akan mendukung upaya atas peningkatan pendapatan yang dimiliki para pemilik usaha tersebut. Dengan situasi yang kondusif di masyarakat, peranan pemerintah, diharapkan tumbuh dan berkembangnya investasi-investasi swasta sebagai bentuk partisipasi masyarakat, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor *Home Industry*”

sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry*.

II. METODELOGI

Jenis Penelitian

Menurut Hasan (2002) metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif (penggambaran) yang berupa fakta-fakta maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang dicermati dan penelitian ini tidak mengadakan perhitungan.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antar fenomena.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa landungsari kecamatan dau kabupaten malang.

Sumber Data

Data adalah segala keterangan atau informasi, mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan

data. Hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian Amirin (1995). Sedangkan menurut Arikunto (1998) Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya responden, Data tersebut di peroleh di Kantor Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2) Data sekunder yaitu sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Data sekunder atau data tertulis yakni data dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Pada penelitian ini diambil data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu: a) Gambaran umum lokasi penelitian b) Tugas dan fungsi perangkat di Kantor Desa Landungsari c) Struktur dan bagan organisasi Kantor Desa Landungsari d) Program kerja Desa Landungsari

Responden

Responden penelitian adalah seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti (dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu yang pertama *snowball sampling*. Menurut Widayat (2004) *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana pertama-tama kelompok responden dipilih secara random. Dengan demikian seluruh Pegawai di Kantor Desa Landungsari digunakan sebagai obyek penelitian.

Maka yang dijadikan responden yakni: 1) Kepala Desa Landungsari Kabupaten Kecamatan Dau Malang 2) Seluruh pegawai di kantor desa Landungsari 3) Kepala Dusun yang ada di Desa Landungsari 4) Pemilik *home industry* di wilayah Desa Landungsari

Instrument Penelitian

Instrumen penelitian ini menunjuk pada alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Peneliti Sendiri, Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Maleong, 2006). Peneliti bertindak selaku instrument penelitian karena sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya (Maleong, 2006). 2) *Interview Guide* (Pedoman wawancara), Pedoman wawancara merupakan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian. 3) *Field Note*, Sebagai pelengkap dan dari catatan-catatan lapangan maka peneliti juga *memanfaatkan handphone* atau kamera agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah: a) Observasi, Menurut S. Margono dalam buku Zuriah (2007) observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. b) Wawancara, dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan peranan mereka masing-masing Zuriah (2007). c) Dokumentasi, cara atau metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang tertulis atau tercetak dalam bentuk buku, arsip dan sebagainya, yang dianggap penting demi menganalisis dan memperkuat suatu data dalam proses penelitian Zuriah (2007).

Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah suatu bentuk kegiatan dalam menyusun dan melengkapi sebagai laporan dari hasil penelitian hingga sampai kepada tahap kesimpulan. Menurut Milles dan Huberman (1992), analisa data kualitatif terdiri dari tiga komponen yakni : a) Reduksi data, laporan lapangan dipilah hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang hal yang tidak diperlukan. b) Data *display* (Penyajian Data) Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk tabel dan teks yang bersifat naratif yang merupakan penjelasan agar mempunyai makna yang dapat dipahami oleh orang lain. d) *Verifikasi* (Penarikan Kesimpulan) Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Keabsahan Data

- a. *Kredibilitas*, agar hasil penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, upaya-upaya yang dilakukan antara lain: 1) Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. 2) Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh sehingga semakin mengetahui peranan *home industry* di Desa Landungsari kecamatan Dau Kabupaten Malang. 3) Melakukan triangulasi, terhadap metode maupun sumber data, dan melacak kelengkapan hasil analisis data.
- b. *Transferabilitas*, dilakukan dengan cara meminta bantuan orang lain termasuk yang diteliti untuk membaca laporan hasil penelitian atau abstraksinya
- c. *Dependabilitas*, agar temuan peneliti dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, *auditor independent* seperti dosen pembimbing sangat diperlukan untuk melihat proses penelitian.
- d. *Confirmabilitas*, dimaksudkan untuk memeriksa keterkaitan data hasil penelitian dan informasi serta interpretasi dalam organisasi pelaporan yang didukung materi-materi yang digunakan dalam auditorial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Landungsari terletak antara Kota Malang dan Kota Batu. Topografi ketinggian berada pada daratan tinggi sekitar 540 meter diatas permukaan laut, curah hujan rata-rata mencapai 3000 mm,

Wilayah Administrasi

Secara administratif Desa Landungsari terletak di wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang Landungsari memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 399 Ha Batas-batas wilayah sebagai berikut: 1)Sebelah Barat Desa Tegal Weru dan Desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 2) Sebelah Selatan Kelurahan Merjosari Lowokwaru 3) Sebelah Utara Kelurahan Tlogomas Lowokwaru 4) Sebelah Timur Kelurahan Tlogomas Lowokwaru

Kondisi dan Ciri Geografi Wilayah

Luas wilayah Desa Landungsari 3 99,7 ha. Luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti pemukiman, pertanian, perindustrian, fasilitas umum, kegiatan ekonomi dan lain- lain. Luas lahan yang

digunakan untuk pemukiman 161 ha terdiri atas pemukiman umum 16 ha dan 145 ha pemukiman KPR-BTN Luas lahan untuk pertanian 83 ha yang terdiri atas: Sawah irigasi teknis 53 ha dan 30 ha sawah tadah hujan. Luas tanah tegalan 141 ha dan pemakaman umum 5 ha sedangkan untuk kegiatan ekonomi 0,7 ha dan untuk perkantoran, sekolah dan lapangan serta jalan sekitar. Wilayah desa Landungsari secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah sawah yang sangat cocok dengan pertanian.

Demografi/Kependudukan

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Bulan Januari 2012

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-12	121 orang	1,3%
2	1-5	624 orang	6,8%
3	0-7	1003 orang	10,9%
4	7-18	1518 orang	16,6%
5	18-56	4841 orang	53%
6	>56	2247 orang	24,6%
Jumlah Total		9122 orang	100 %

Sumber: Kantor Desa Landungsari

Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan memacu tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Landungsari hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Landungsari, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Landungsari baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Landungsari yaitu melalui pelatihan dan kursus. Misalnya pelatihan ketrampilan perbengkelan dan otomotif yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang, Bahkan Desa Landungsari telah menggagas untuk adanya SMK Negeri di Desa Landungsari . dengan gagasan tersebut di atas nantinya Desa Landungsari mampu menyiapkan tenaga-tenaga trampil sesuai kebutuhan.

Jumlah Penduduk berdasarkan agama

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama.

Tabel 5
Nama-Agama dan Pemeluknya Bulan Januari 2012

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	8445 Orang
2	Katolik	215 Orang
3	Kristen	112 Orang
4	Hindu	15 Orang

Sumber: Kantor Desa Landungsari

Aspek-Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat semakin maju hal ini ditunjukkan jumlah kemiskinan yang semakin mengecil, meskipun tiga dusun yang berada dibawah wilayah Landungsari ada perbedaan situasi dan kondisi perekonomian.

Pada umumnya Desa Landungsari masyarakatnya sangat menjunjung budaya leluhur, gemar bergotong royong, adat dan tradisi masih dipertahankan, di samping itu masyarakat Desa Landungsari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan model keterbukaan dan kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat desa dan memaksimalkan kinerja Pemerintah Desa, serta peran aktif BPD dalam merencanakan, mengendalikan, memonitoring pelaksanaan pembangunan masyarakat desa Landungsari, faktor-faktor yang menyebabkan masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan desa saat ini dapat di minimalisir.

Kondisi Pemerintahan

Kata pemerintahan mempunyai arti kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh perangkat Negara yang di kenal dengan pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam kenyataannya tidak saja menyangkut perusahaan, rumah tangga desanya sebagaimana disebutkan dalam pengertian desa, akan tetapi juga menyelenggarakan urusan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UUD No. 22 Tahun 1999, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. Undang -Undang No. 22 tahun 1999, tidak secara tegas mengatur tentang urusan rumah tangga desa (Hak Otonomi Desa), hanya dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 107 UU ini yang mengatur tentang sumber pendapatan desa yaitu karena desa harus menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka desa harus mempunyai pendapatan.

Sumber Pendapatan Desa antara lain Sumber Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari: Pendapatan desa dibagi atas :1) Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari:a) Tanah Kas Desa Retribusi Desa b) Hasil Usaha Milik Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa c) Pungutan Desa / Administrasi 2) Dana perimbangan terdiri dari : a) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah b) Bantuan Keuangan Dari Kabupaten c) Bantuan Keuangan Dari Pusat d) Bantuan Tambahan Modal BUMDes 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, terdiri dari : a) Bantuan Dana Penyeimbang Dari Kabupaten b) Dana Darurat c) Dana Hibah

Dari ketentuan di atas, penulis berpendapat bahwa lancar tidaknya

penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, (Otonomi Desa) sangat tergantung pada pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya dalam mengerjakan tanah-tanah desa, pemberian sumbangan hasil kerja gotong royong dan lain-lain. Menurut UU Nomor. 22 Tahun 1999, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa, menurut Peraturan UU No. 22 Tahun 1999, mempunyai tugas: a) Memimpin menyelenggarakan pemerintah desa b) Membina kehidupan masyarakat desa c) Membina perekonomian desa d) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa f) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

Struktur organisasi

**Tabel 6 Data perangkat Desa Landungsari Kecamatan Dau
Bulan Januari Tahun 2012**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Danu	Kepala Desa
2	Siswono	Sekretaris Desa
3	Mufarrih Hanaur Rosvid SHI	Kaur Umum
4	Sunaryo	Kaur Keuangan
5	Sugiyono	Kebayan
6	Yahudi	Kuwowo
7	Saiful Hidayat,S.Ag	Modin
8	Ramu Sugiarto	Kepetengan
9	Tobat	Kamituwo Klandungra
10	Darmanu	Kamituw o
11	Suharmanto	Kamituwo Rambaan

Sumber: Kantor Desa Landungsari

PENYAJIAAN DATA

Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor *Home Industry*”

Dari berbagai konsep mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry*, berikut beberapa jenis terobosan strategi yang diterapkan Pemerintah Desa Landungsari antara lain:

Kemudahan dalam Akses Permodalan

Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha *home industry*, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha *home industry*. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* yakni pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Yang perlu dicermati dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* melalui aspek permodalan ini adalah: 1) Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan.2) Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan. 3) Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

Berikut pernyataan Kepala Desa Landungsari H. Danu: “Tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam memberikan kemudahan dalam akses permodalan adalah melaksanakan, memberikan informasi mengenai peminjaman terhadap pihak ketiga yakni bank, namun rata-rata pihak home industry sudah mempunyai modal yang kuat sehingga dalam hal permodalan masalahnya sudah teratasi hanya saja ada bantuan dari APBD dan PNPM yaitu peningkatan usaha masyarakat dan simpan pinjam sebagai realisasi dari kegiatan dalam bidang koperasi dan usaha masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) (Wawancara 28 Juni 2012)”

Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalau dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Landungsari Siswono: “Komponen penting dalam strategi Pemerintah Desa Landungsari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* adalah pembangunan sarana pendukung seperti akses untuk mempermudah dalam memperoleh bahan baku usaha. Sekertaris Desa Landungsari Siswono mengatakan bahwa: “untuk menjamin meningkatkan kelancaran dalam akses pengangkutan bahan hasil maupun dari hasil pertanian pemerintah desa melakukan pembangunan jalan sebagai jalur alternatif dan jalur pertanian serta renovasi jalan-jalan umum di wiayah desa Landungsari yang sumber dananya dari APBD/APBDes dan Swadaya masyarakat dengan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa dalam desa untuk mempertanggung jawabkan kegitan di hadapan BPD dan bahkan juga kepada masyarakat karena merekalah yang memanfaatkan dan mengeluarkan dana tambahan untuk terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan di Desa.” (Wawancara 28 Juni 2012)

Tersedianya prasarana atau transportasi dari lokasi produksi bahan baku ke tempat pengolahan, akan mengurangi rantai proses mendatangkan bahan baku dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan *home industry*, artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa memang strategis atau perlu dilakukan.

Pengembangan Skala Usaha

Strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Berikut pernyataan Kepala Desa Landungsari H. Danu: “Keberadaan *home industry* diwilayah Desa Landungsari kepemilikannya bersifat individu atau pribadi sehingga berkaitan dengan hal pengembangan skalah kusahadari individu menjadi usaha bersama atau kelompok tidak bisa dilakukan meskipun terdapat permasalahan namun rata-rata usaha yang dilakukan sudah cukup mapan mulai dari hal permodalan maupun hal-hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan home industry”.(Wawancara 28 Juni 2012).

Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi *home industry* untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya melakukan kerja sama dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis *home industry* dalam kaitan dengan strategi diatas, pemerintah Desa Landungsari telah melakukan beberapa usaha seperti yang dikemukakan oleh Bapak Desa H. Danu dalam hal pengembangan Jaringan Usaha,

Pemasaran dan Kemitraan Usaha “Berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yakni bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Malang (sebagai sisi *supply approach*) untuk memberikan pelatihan tentang manajemen dan membantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan industri yang ada di Desa Landungsari Pendapat ini diperkuat oleh salah satu pemilik *Home industry* olahan kripik singkong Ibu Nunung, “Kami dari pihak pemilik *Home industry* mesiasati proses untuk memperkenalkan hasil produksi yakni melalui siaran di TV lokal seperti Malang TV mengenai keberadaan usaha serta produk yang kami hasilkan sehingga mudah untuk dikenali oleh publik atau konsumen yang akan menggunakannya dari hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dan daerah pemasarannya, dan permintaan kripik singkong yang daerah pemasarannya sampai ke luar Daerah Jawa Timur seperti Bali.” (Wawancara 28 Juni 2012)

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Desa H. Danu dalam hal pengembangna Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha *home industry* di Desa Landungsari “Oleh karena itu dalam pengembangan *home industry*, Pemerintah Desa Landungsari juga meningkatkan program pelatihan bagi masyarakat pemilik *home industry* baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, *on the job training*, pemagangan dan kerja sama usaha yang ksemuanya diwadahi oleh pemerintah desa setempat.”(Wawancara 28 Juni 2012) Selain itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan (Hafsah, 2004).

Peningkatan Akses Teknologi,

Strategi yang dilakukan pemerintah desa Landungsari dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan *home industry* adalah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan usaha, pengembangan pusat inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasilokasi *home industry* dan peningkatan kerjasama antara asosiasi-asosiasi *home industry* dengan perguruan Tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi *home industry*.

Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif

Dalam hal ini perlu ada upaya untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi keberlangsungan dan peningkatan kinerja *home industry*. Selain itu perlu ada tindakan untuk melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak tepat, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, serta pengawasan dan pembelaan terhadap praktek-praktek persaingan usahah yang tidak sehat dan didukung penyempurnaan perundangundangan serta pengembangan kelembagaan.

Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Landungsari

Seperti halnya kondisi perekonomian desa-desa di Indonesia pada umumnya mata pencarian mayoritas penduduk Desa Landungsari adalah petani untuk menambah pendapatan mereka juga melakukan usaha tambahan warung, kopi, kios, nasi pecel, dukun pijat, pedagang, usaha kecil dan menengah, industri dan lain-lain. Untuk mengetahui secara tepat mengenai tingkat pendapatan masyarakat Desa Landungsari maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.
Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) Desa Landungsari Tahun 2011
Bulan Januari Tahun 2012

No	Sumber Pendapatan	Hasil
1	Industri Rumah Tangga	Rp. 100.000.000
2	Pariwisata	Rp. 0
3	Penginapan/Hotel	Rp. 0
4	Jasa	Rp. 260.000.000
5	Perdagangan	Rp. 300.000.000
6	Perikanan	Rp. 0
7	Peternakan	Rp. 300.000.000
8	Perkebunan	Rp. 60.000.000
9	Lading/Tegalan	Rp. 400.000.000
10	Pertanian	Rp. 500.000.000
	Jumlah	Rp. 1.920.000.000

Sumber : Kantor Desa Landungsari

Dilihat dari aspek pembangunan ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk Desa Landungsari sudah cukup baik, hal ini dilihat dari berbagai indikator pembangunan ekonomi. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB juga diakui dengan kenaikan pendapatan perkapital dimana perkembangan pendapatan perkapital menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan harga konstan yang berlaku, pendapatan perkapital penduduk Desa Landungsari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9.
Pendapatan Perkapital Desa Landungsari
Bulan Januari Tahun 2012

N0	Keterangan	Keterangan
1	Pendapatan Perkapital Tahun 2011	Rp. 18.600.000,-
2	Pendapatan Perkapital Tahun 2010	Rp. 17.600.000,-

Sumber: Kantor Desa Landungsari

Dari realisasi program pendataan sosial (PPS) tahun 2010, diketahui rumah tangga sasaran di Desa Landungsari mengalami penurunan. Angka penurunan rumah tangga penerima raskin mencapai 198 dari jumlah RTS yang sebelumnya 201.

Peranan *Home Industry* Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Landungsari

Home industry di Indonesia masih terikat pada pasar yang tidak menentu, hal ini disebabkan oleh permintaan konsumen yang tidak menentu baik dari kuantitas maupun daerah sasaran pasar, maka diperlukan segmen dan wilayah konsumen yang jelas. Sehingga dalam peningkatan pendapatan mau tidak mau *home industry* harus mempunyai segmen konsumen dan sasaran wilayah pemasaran yang jelas. Produk-produknya pun selain bersaing dalam kualitas maupun bersaing dalam harga jual. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Keuangan Desa Landungsari Bapak Sunryo: "*Home industry* yang ada di Desa Landungsari ini ada tiga *home industry* yang karyawannya sebanyak 40 orang, tersebar di tiga *home industry*, rata-rata pendapatan mereka perbulan berkisar antara Rp 400.000-500.000 perbulan". (Wawancara pada 25 juli 2012). *Home industry* selain mampu menambah pendapatan mereka dan sebagai salah satu pilihan oleh ibu-ibu di wilayah Desa Landungsari terutama bagi Ibu-ibu yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dengan pihak perusahaan rokok di wilayah Desa Landungsari akibat pihak perusahaan mengalami bangrut. Dengan demikian usaha ini sudah menjadi sumber utama pendapatan sebagian masyarakat khususnya kaum hawa yang bekerja. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Siswono Sekretaris Desa Landungsari: "Dulu di Desa Landungsari ada perusahaan rokok banyak Ibu-ibu disini yang bekerja di perusahaan rokok tersebut akibat pihak perusahaan mengalami bangrut maka banyak yang di PHK, dan pada akhirnya Ibu-ibu tersebut beralih kerja ke *Home industry* yang ada di Desa Landungsari seperti *Home industry* Olahan kripik yang berbahan baku dari umbi-umbian, *Home industry* keramik, dan *Home industry* olahan Kue Kering sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mendatangkan pendapatan yang lebih banyak yang pada akhirnya kami juga membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran". (wawancara 25 juli 2012).

Nampaknya apa yang disampaikan oleh Bapak Siswono Sekretaris Desa Landungsari tersebut sesuai dengan keinginan, bahwa usaha kecil yang kuat akan menjadi usaha menengah dan akhirnya besar dan menjadi produksi perekonomian Nasional. *Home industry* yang kuat dan mampu bersaing akan mampu menjadi produksi perekonomian nasional.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Strategi Pemerintah Desa Landungsari Dalam Meningkatkan Tingkat Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor *Home Industry*

Sebagian besar *home industry* yang di daerah pedesaan, pada umumnya jenis usaha yang dilakukan bersifat sederhana dalam bentuk industri rumah tangga. Karakteristik yang melekat pada *home industry* bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial, di sisi lain pada kekuatan tersebut implisit terkandung kekurangan atau kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan usaha tersebut. Pembinaan *home industry* harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, namun disadari pula bahwa pengembangan *home industry* di Desa Landungsari menghadapi beberapa kendala seperti: 1) Kurang mempunyai keahlian dibidang manajemen yang sangat dibutuhkan dalam mengelola usaha, 2) Keterbatasan Kemampuan dalam Penetrasi pasar, 3) Kurangnya akses untuk memperoleh bahan baku, 4) Kurangnya akses untuk memperoleh modal. Secara garis besar, strategi pemerintahan Desa Landungsari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* yakni: 1) Pengembangan Iklim Usaha dan Investasi, 2) Peningkatan Kemampuan *Home Industry*, 3) Pengembangan Sistem Pendukung *Home Industry* di Desa Landungsari

Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa Landungsari

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Desa Landungsari sebanyak 9122 jiwa. Dilihat dari aspek pembangunan ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk Desa

Landungsari sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan ekonomi, dengan kenanikan pendapatan perkapital menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan harga konstan yang berlaku, pendapatan perkapital penduduk Desa Landungsari pada tahun 2010 sebesar Rp. 17.600.000,- sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 18.600.000,- dengan penerimaan dari sektor *home industry* sebesar Rp. 100.000.000,-. Dari realisasi Program Pendataan Sosial (PPS) tahun 2010, diketahui rumah tangga sasaran mengalami penurunan rumah tangga penerima raskin mencapai 198 dari jumlah RTS yang sebelumnya 201.

Peranan *Home Industry* Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Landungsari

Pada tahun 2011 *home industry* mencapai 3 unit usaha atau 30 persen dari 10 unit industri yang ada di Desa Landungsari, Serta Produk Domestic Desa Bruto (PDDB) Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya yang terlibat mencapai 40 dari Produktivitas *home industry*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peranan *home industry* dalam perekonomian Desa Landungsari adalah sebagai berikut : a) Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran masyarakat Desa Landungsari b) Membantu petani di Desa Landungsari, karena permintaan bahan baku yang bersumber dari hasil pertanian penduduk Desa Landungsari. Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Desa Landungsari.c) Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, d) Menyelenggarakan kehidupan ekonomi padat karya, e) Memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat, f) Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi Desa Landungsari, g) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk strategi yang dilakukan pemerintah Desa Landungsari antara lain:

1. Memberikan bantuan untuk kemudahan dalam akses permodalan
2. Bantuan Pembangunan Prasarana penunjang usaha *home industry*
3. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha.
4. Pengembangan sumber daya manusia
5. Peningkatan Akses Teknologi bagi pengembangan *home industry* .
6. Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif

Saran

Saran-saran yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Desa Landungsari dalam meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* adalah sebagai berikut:

1. Karena strategi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor *home industry* yang dilakukan Pemerintahan Desa Landungsari memberikan efek yang baik dan saling mempengaruhi secara positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maka disarankan ini tetap dipertahankan dan jika perlu dilakukan strategi lanjutan dalam pengembangan sektor *home industry* yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan situasi bisnis, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dalam menjalankan usaha *home industry*.
2. Iklim bisnis yang lebih kondusif harus ditingkatkan karena Persoalan yang selama ini terjadi iklim bisnis kurang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha
3. partisipasi aktif dari pemilik *home industry* maupun Masyarakat Desa Landungsari dalam kegiatan pemberdayaan usaha tersebut perlu ditingkatkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, 2009. *Transformasi Birokrasi*, Yogyakarta Universits Atma Jaya Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chambers. 1995 *Participatory rural appraisal, memahami desa secara partisipatif*. Bandung. Sinar Grafika
- Djojohadikusumo, Sumatri, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor , 2002).
- Elisabeth Dianawati dan Prasetiantoka, *Pengembangan Industri Kecil sebagai langkah pemantapan struktur ekonomi menghadapi pasar bebas*, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2002).
- Harmoko. 2001. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Harimurti Subanar, *manajemen usaha kecil*, (Yogyakarta: Fakultas ekonomi UGM, 2001).
- Kansil. 1985. *Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta. Jala Permata
- Marbun, 1996, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Edisi Pertama, Binaman Pressindo, Jakarta.
- Martin Perry, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Jakarta: Murai Kencana PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Maryatno dan Y. Sri Susilo, *Tulisan dari masalah usaha kecil sampai masalah ekonomi makro* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996).
- Muhammad, Arni. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000).
- Sutanto, Astrid. 2001. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru Usaha Nasional*: Surabaya
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press: Surakarta.
- Subanar, Harimukti, 1998, *Manajemen Usaha Kecil*, Edisi Pertama, BPF, Yogyakarta.
- Stoner, Freeman and Gilbert Jr, 1998, *Manajemen Industri Kecil*, Jilid I, Penerbit PT. Prehallindo: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang U No.22 Tahun 1999 dan UU No.3 Tahun 2004,
- Zuriah Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.